

## ANALISIS KEMANDIRIAN IKAN DAN PANGAN HEWANI LAINNYAPADA 26 KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

### *The Analysis of Fish and Other Animal Food Self-Sufficiency in 26 Districts/ Cities of West Java 2012*

Yayuk Farida Baliwati<sup>1\*</sup>, Iqbar Mahendra Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis,  
Bogor 16680 Jawa Barat 15; Telp: 08128199903

\*Korespondensi: yayuk\_gm@yahoo.com;

Diterima 03 September 2014/Disetujui 13 Desember 2014

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi konsumsi aktual dari ikan dan pangan hewani lainnya terhadap konsumsi normatif pangan hewani; pola konsumsi dan produksi ikan dan pangan hewani lainnya; serta rasio kecukupan ikan dan pangan hewani lainnya berdasarkan produksi bersih terhadap konsumsi normatif. Desain penelitian ini adalah cross sectional study. Penelitian dilaksanakan di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan pada bulan Januari–Juli 2014, kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan sudah menjadi angka tetap (ATAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 21 (80,8%) kabupaten/kota mempunyai konsumsi aktual di bawah konsumsi normatif. Konsumsi pangan ikan dan pangan hewani lainnya penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 tergolong rendah. Kontribusi ikan dalam konsumsi pangan hewani sekitar 13-44 % sehingga menjadi salah satu komoditas penentu pola konsumsi pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Komoditas ikan juga menjadi pola produksi pangan hewani di hampir semua kabupaten/kota di Jabar, kecuali Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi. Pola konsumsi pangan penduduk belum memanfaatkan potensi sehingga tidak selalu sesuai dengan pola produksi pangan wilayah. Pada tahun 2012 terdapat 13 (50 %) kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah mandiri pangan ikan dan pangan hewani lainnya.

Kata kunci: ikan dan pangan hewan lainnya, kemandirian pangan, konsumsi dan produksi pangan

#### Abstract

This study was aimed to determine the actual situation of production and consumption, and animal food adequacy ratio based on net production deviated to normative consumption. This study used cross sectional study and conducted at 26 districts/cities in West Java Province. The collecting, processing, and analyzing of data since January until July 2014. This study used secondary data that had become a constant number. The results of this study showed that 21 (80,8%) districts/cities have actual consumption below the normative consumption. Fishes consumption and the others animal consumption in West Java citizen in 2012 were included to low category. Fishes contribute in animal food consumption about 13-44% so that became the one of the determining commodity for animal food pattern in 26 districts/cities in West Java Province. Fishes commodity also became animal food production pattern almost in those all districts/cities in West Java Province except Sukabumi District, Bandung City, Depok City, and Cimahi City. The pattern of citizen's food consumption has been utilized the potential yet, so was not always appropriate with the pattern of district food production. In 2012, there were 13 (50%) districts/cities in West Java Province that have become self-sufficiency in fishes and the others animal food.

Keywords: Fish and the other animal food, food self-sufficiency, consumption and production.

#### PENDAHULUAN

Ikan dan pangan hewani lainnya merupakan kelompok pangan sumber protein

yang penting bagi tubuh untuk dapat hidup aktif dan sehat. Protein sebagai salah satu zat gizi yang bersifat esensial, harus dipenuhi dari luar

tubuh melalui konsumsi yang cukup. Namun, konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya di Indonesia masih rendah (Muir 2013). Pada tahun 2011-2012 secara keseluruhan konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah konsumsi energi dari pangan hewani adalah 146,6 kkal/kap/hari, meliputi konsumsi ikan sebesar 45,19 kkal/kapita/hari, lebih rendah dari pada jumlah konsumsi daging sebesar 52,52 kkal/kapita/hari, telur dan susu sebesar 48,89 kkal/kapita/hari (Billah *et al.* 2013). Konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya masih rendah karena baru mencapai 61 % kebutuhan hidup sehat, aktif dan produktif. Rendahnya konsumsi tersebut dapat menimbulkan masalah pada keseimbangan gizi. Ikan dan pangan hewani lainnya merupakan salah satu penentu keseimbangan gizi untuk membentuk pola konsumsi ideal, yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pemenuhan konsumsi pangan termasuk ikan dan pangan hewani lainnya sampai tingkat individu merupakan kewajiban pemerintah, yang dapat dilakukan secara mandiri berdasarkan kemampuan produksi wilayah. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan dan kebijakan pemerintah berbasis sumberdaya pangan maupun permintaan pangan. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi pangan, pola konsumsi pangan aktual maupun normatif untuk hidup sehat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan wajib pangan.

Tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat yang termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selama kurun waktu 2000-2010 telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.89% per tahun. Jumlah penduduk di Jawa Barat merupakan jumlah penduduk terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dengan presentase 18% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS 2013). Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks untuk

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jawa Barat juga menghadapi tantangan lain yang bersifat eksternal yaitu perubahan iklim dan perdagangan dunia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal secara berdaulat dan mandiri. Kemandirian pangan menjadi isu sentral penyelenggaraan urusan pangan oleh pemerintah daerah.

Simatupang (2001), IFPRI (2010) menyatakan bahwa kemandirian pangan sebagai ukuran ketahanan pangan dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan pada kemampuan produksi pangan. Impor digunakan sebagai substitusi jika terdapat penurunan produksi pangan, sehingga kemandirian pangan ditandai oleh impor pangan utama di bawah 10% dari kebutuhan pangan (Balitbang Pertanian 2005). Dengan kata lain, kemandirian pangan ditunjukkan oleh kapasitas produksi pangan atau kelompok pangan atau komoditas tertentu sebesar 90% dari kebutuhan konsumsi pangan, yang merupakan batas minimal terpenuhi kecukupan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian ikan dan pangan hewani lainnya di 26 kabupaten/kota wilayah Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) situasi konsumsi aktual dari ikan dan pangan hewani lainnya terhadap konsumsi normatif pangan hewani; 2) pola konsumsi dan produksi ikan dan pangan hewani lainnya; 3) rasio kecukupan ikan dan pangan hewani lainnya berdasarkan produksi bersih terhadap konsumsi normatif.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian

ini adalah data sekunder dan sudah menjadi angka tetap (ATAP). Data yang tersedia adalah data tahun 2012, karena ATAP 2013 diputuskan pada bulan Juli tahun 2014. Jenis dan sumber data terdapat pada Tabel 1.

## METODE

### Desain, Tempat, dan Waktu

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Penelitian di lakukan di 26 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian di wilayah Jawa Barat, menggunakan metode purposive. Jawa Barat merupakan Provinsi yang sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemandirian Pangan yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan sudah menjadi angka tetap (ATAP). Data yang tersedia adalah data tahun 2012, karena ATAP 2013 baru dipublikasi setelah bulan Juli tahun 2014. Secara lengkap, jenis dan sumber data terdapat pada Tabel 1.

### Pengolahan dan Analisis Data

Konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya terdiri dari ikan, daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu dengan satuan kkal/kapita/hari. Pengolahan data konsumsi ikan dan pangan hewani menggunakan software Analisis dan Perencanaan Konsumsi Pangan berdasarkan data Susenas, yang dikembangkan oleh Pusat Konsumsi Badan Ketahanan Pangan,

Kementerian Pertanian bekerjasama dengan MWA Training & Consulting Tata Kelola Ketahanan Pangan (2012).

Pendekatan PPH menyarankan bahwa konsumsi normatif ikan dan pangan hewani lainnya untuk hidup sehat, aktif dan produktif adalah 12% Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari atau setara 240 kkal/kap/hari (Hardinsyah *et al.* 2004). AKE yang digunakan merupakan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004, karena tahun analisis adalah tahun 2012 dan WNPG tahun 2008 tidak pernah digunakan sebagai acuan dalam perhitungan AKG di kalangan ahli gizi.

Berdasarkan sumbangan energi ikan dan pangan hewani lainnya terhadap total ikan dan pangan hewani lainnya dapat diketahui pola produksi maupun konsumsi. Suatu komoditas disebut sebagai pola produksi bersih (ketersediaan pangan untuk dikonsumsi) maupun pola konsumsi pangan, jika mampu memberikan kontribusi energi  $\geq 5\%$  (Cahyaningsih 2008).

Mengacu pada pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBM), produksi ikan dan pangan hewani lainnya diolah menjadi produksi bersih, yang menggambarkan jumlah ikan dan pangan hewani lainnya yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk, dengan satuan kkal/kapita/hari, dengan rumus sebagai berikut :

Produksi Bersih = Produksi - Penggunaan (pakan, bibit/benih, bahan baku industri makanan dan non makanan, tercecer)

Tabel 1 Jenis dan sumber data penelitian

Jenis Data	Kuat tarik (kPa)
Produksi ikan dan pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu) di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012	Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat
Konsumsi ikan dan pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu,) di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012	Tabel 4, Modul Konsumsi/ Pengeluaran Rumahtangga, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, Provinsi Jawa Barat
Jumlah penduduk di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012	BPS, Provinsi Jawa Barat

Metode dan besaran berbagai penggunaan (pakan, bibit/benih, bahan baku industri makanan dan non makanan, tercecer) untuk menghitung produksi bersih mengacu pada panduan penyusunan NBM menurut BKP (2012).

Kemandirian pangan (termasuk ikan dan pangan hewani lainnya) di suatu wilayah dianalisis berdasarkan perspektif swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan (konsumsi) pangan normatif diutamakan berasal dari kemampuan produksi pangan dari padi pembelian atau impor pangan (Abrar, 2008, IFPRI 2010, FFTC 2013). FFTC (2013) menyatakan bahwa satuan yang relevan untuk analisis kemandirian pangan (termasuk ikan dan pangan hewani lainnya) adalah energi (Kal/kap/hr).

Kemandirian pangan dihitung dari produksi bersih terhadap konsumsi normatif atau rasio kecukupan (RK) ikan dan pangan hewani lainnya berdasarkan produksi bersih terhadap konsumsi normatif. Jika  $RK < 90\%$  maka wilayah tersebut termasuk tidak mandiri pangan (TMP). Jika  $RK < 90\%$  maka wilayah tersebut tergolong kemandirian pangan. Tingkat kemandirian pangan diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu: 1) tingkat kemandirian pangan rendah (MPR), jika  $90 > RK > 110$ ; 2) tingkat kemandirian pangan sedang (MPS), jika  $111 > RK > 220$  (surplus sampai dengan 100%); 3) tingkat kemandirian pangan tinggi (MPT), jika  $RK > 220$  (surplus  $> 100\%$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Wilayah

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak antara  $104^{\circ} 48' 00''$  Bujur Timur-  $108^{\circ} 48' 00''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 50' 00''$  Lintang Selatan-  $7^{\circ} 50' 00''$  Lintang Selatan. Wilayah Jawa Barat memiliki karakteristik topografi dari mulai dataran sampai areal yang bergunung, dengan ribuan sungai besar dan kecil. Wilayah Jawa Barat terdiri atas 19 kabupaten dan 7 kota. Povinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.709.528,44 Ha dan wilayah pesisir laut, sepanjang 12 mil dari garis pantai

seluas 18.153 km<sup>2</sup>. Daerah Jawa Barat terdapat 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas 32.074,40 km<sup>2</sup> dan memiliki 3.502 buah sungai (Departemen Kehutanan Jawa Barat 2013).

Kabupaten terluas adalah Sukabumi dengan luas wilayah sebesar 4.160,75 km<sup>2</sup> atau 11,19% dari luas total wilayah Jawa Barat. Wilayah kota terluas adalah Bekasi dengan luas wilayah sebesar 213,58 km<sup>2</sup> atau 0,57% dari luas total wilayah Jawa Barat (BPS 2014).

Kondisi topografinya beragam mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Seluas 330.946,92 Ha berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl), 312.037,34 Ha berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 Ha berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 585.348,37 Ha berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 Ha berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl (BPS 2014).

Tahun 2012 jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa (BPS 2010). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi terpadat di Indonesia dan termasuk dalam klasifikasi 600-1.200 orang per km<sup>2</sup> (BPS 2010). Sebesar 50% kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan penduduk sedang (1-2%) dan 23,1% kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi ( $>2\%$ ). Jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 4.989.939 jiwa (11,2% dari penduduk Jawa Barat), dengan kepadatan penduduk 1.664,75 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terkecil berada di Kota Banjar dengan jumlah penduduk 180.030 jiwa (0,4%) dengan kepadatan penduduk 1.375,74 jiwa/ km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Depok yaitu sebesar 9.205,561 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk yang terkecil berada di Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 587,823 (BPS 2013).

Kedua variabel tersebut yaitu kondisi sumberdaya alam (SDA) dan demografi merupakan variabel yang berkaitan langsung dengan tingkat kemandirian pangan di suatu wilayah. SDA menggambarkan potensi ekosistem wilayah untuk memproduksi pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan

penduduk. Jumlah kebutuhan pangan penduduk atau permintaan pangan di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh jumlah dan laju pertumbuhan penduduk (Luan *et al.* 2013).

### Situasi Konsumsi Ikan dan Pangan Hewani Lainnya

Situasi konsumsi komoditas ikan dan pangan hewani lainnya terdapat pada Tabel 2. Secara aktual konsumsi penduduk di wilayah Kota relatif lebih baik dari pada di Kabupaten. Hanya dua wilayah yang sudah

memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup sehat (90-110% angka kecukupan) yaitu di kota Cimahi dan Bogor. Penduduk di Kota Bandung, Bekasi, Depok mengkonsumsi ikan dan pangan hewani lainnya melebihi angka kecukupan, yaitu masing-masing 114,5%; Kota 158,3% dan Kota 144,6%.

Terdapat 21 kabupaten/kota (80,8%) yang mempunyai konsumsi aktual komoditas ikan dan pangan hewani lainnya di bawah konsumsi normatif. Secara umum dapat dinyatakan bahwa konsumsi pangan ikan

Tabel 2 Konsumsi aktual dan konsumsi normatif ikan dan pangan hewani lainnya (Kal/kap/hr) pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Konsumsi		Konsumsi Normatif Pangan Hewani (B)	% (A/B)
		Ikan (% A)	Pangan Hewani (A)		
1	Kabupaten Bogor	38,8 (24,6)	158	240	65,8
2	Kabupaten Sukabumi	52,5 (38,6)	136	240	56,7
3	Kabupaten Cianjur	37,8 (32,1)	118	240	49,2
4	Kabupaten Bandung	31,9 (20,9)	153	240	63,8
5	Kabupaten Garut	28,7 (26,7)	107	240	44,6
6	Kab Tasikmalaya	31,8 (29,4)	108	240	45,0
7	Kabupaten Ciamis	35,7 (27,3)	131	240	54,6
8	Kabupaten Kuningan	31,3 (21,4)	146	240	60,8
9	Kabupaten Cirebon	32,3 (27,3)	118	240	49,2
10	Kab Majalengka	41,6 (28,9)	144	240	60,0
11	Kabupaten Sumedang	48,6 (28,1)	173	240	72,1
12	Kab Indramayu	81,1 (44,7)	181	240	75,4
13	Kabupaten Subang	60,2 (36,6)	164	240	68,3
14	Kabupaten Purwakarta	52,2 (28,5)	183	240	76,3
15	Kabupaten Karawang	57,3 (36,2)	158	240	65,8
16	Kabupaten Bekasi	45,6 (27,7)	165	240	68,8
17	Kab Bandung Barat	34,2 (28,6)	119	240	49,6
18	Kota Bogor	43,3 (19,3)	225	240	93,8
19	Kota Sukabumi	44,1 (21,6)	204	240	85,0
20	Kota Bandung	37,1 (13,5)	275	240	114,6
21	Kota Cirebon	40,1 (19,7)	204	240	85,0
22	Kota Bekasi	64,9 (17,1)	380	240	158,3
23	Kota Depok	48,7 (14,1)	347	240	144,6
24	Kota Cimahi	39,6 (18,3)	216	240	90,0
25	Kota Tasikmalaya	37,2 (20,2)	184	240	76,7
26	Kota Banjar	31,1 (20,8)	149	240	62,1



dan pangan hewani lainnya penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 masih rendah. Dengan demikian, perlu upaya yang luar biasa untuk meningkatkan konsumsi penduduk terhadap ikan dan pangan hewani lainnya.

Kontribusi ikan dalam konsumsi aktual pangan hewani tidak sejalan dengan tingkat kecukupan pangan hewani. Wilayah dengan konsumsi pangan cukup ternyata ikan mempunyai kontribusi lebih dari 20%. Wilayah yang konsumsi pangan hewani melebihi angka kecukupan, ikan berkontribusi kurang dari 20%.

Faktor yang mempengaruhi kecukupan konsumsi energi dari pangan hewani termasuk ikan adalah selera, pendapatan (Farhan 2008), harga ikan dan jumlah anggota keluarga (Wahyuni 2011). BPS (2013) melaporkan bahwa proporsi pengeluaran ikan di Jawa Barat pada tahun 2012 adalah 2,94% dengan rata-rata pengeluaran/kapita/sebulan adalah Rp 22.019 di wilayah perkotaan dan Rp 15.613 di wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan maupun pedesaan menunjukkan pola bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran/kapita/sebulan maka semakin tinggi pula jumlah belanja ikan. Wilayah perkotaan, penduduk pada golongan pengeluaran/kapita/sebulan 100.000-149.999 berbelanja ikan sejumlah Rp 4.850 dan pada golongan pengeluaran/kapita/sebulan >1.000.000 berbelanja ikan sejumlah Rp 41.242. Hal yang sama terjadi di wilayah pedesaan, pada golongan pengeluaran/kapita/sebulan <Rp 100.000 belanja ikan dengan jumlah Rp 5.677 dan penduduk pada golongan pengeluaran/kapita/sebulan 100.000-149.999 berbelanja ikan sejumlah Rp 30.231.

### **Pola Konsumsi dan Produksi Pangan**

Jumlah konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya terdapat pada tabel 2 terbangun dari berbagai komoditas. Komoditas yang berkontribusi >5% akan menentukan pola konsumsi penduduk pada kelompok ikan dan pangan hewani lainnya (Cahyaningsih 2008).

Kontribusi ikan dalam konsumsi pangan hewani sekitar 13-44 % sehingga menjadi salah satu komoditas penentu pola konsumsi

pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pangan hewani asal unggas (daging dan telur) dan susu juga menjadi pola konsumsi pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Tabel 3). Daging ruminansia tidak menjadi pola konsumsi pangan hewani penduduk kabupaten, tetapi merupakan pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota di Jawa Barat Pola konsumsi pangan yang berbeda tersebut kemungkinan terkait dengan harga pangan. Hasil olahan MWA Training & Consulting Tata Kelola Ketahanan Pangan (2014), pada tahun 2012 harga daging sapi dua setengah kali lipat dari harga daging ayam yaitu Rp 70.969 dan Rp 25.605.

Komoditas ikan menjadi pola produksi pangan hewani di hampir semua kabupaten/kota di Jabar, kecuali Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi. Komoditas unggas (daging dan telur) dan daging ruminansia merupakan pola produksi pangan hewani di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat, kecuali Kabupaten Garut bukan merupakan sentra telur, Kota Bandung bukan menjadi sentra daging unggas dan kabupaten Purwakarta bukan menjadi sentra daging ruminansia. Komoditas susu menjadi pola produksi di Kabupaten Bandung, Garut, Kuningan, Sumedang, Bandung Barat serta Kota Bogor dan Cimahi.

Kondisi tersebut terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya pangan hewani (perikanan, bisnis kelautan dan peternakan), sesuai dengan Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019. Wilayah Pengembangan (WP) 1 yaitu Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur antara lain memiliki potensi dan diarahkan untuk perikanan. WP 2 (Purwakarta, Subang dan Karawang) antara lain memiliki potensi perikanan, bisnis kelautan dan peternakan.

Kabupaten Indramayu, kabupaten Kuningan, kabupaten Majalengka, termasuk WP 3 mempunyai potensi di sektor perikanan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam WP 4 (Priangan Timur dan pangandaran) potensial

Tabel 3 Pola konsumsi dan produksi ikan dan pangan hewani lainnya pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Daging Ruminansia		Daging Unggas		Telur		Susu		Ikan	
		P	K	P	K	P	K	P	K	P	K
1	Kabupaten Bogor	13,9	3,8	59,2	30,6	12,6	17,0	1,5	24,0	12,8	24,6
2	Kabupaten Sukabumi	7,9	2,6	69,2	28,5	17,8	16,5	3,1	13,8	2,1	38,6
3	Kabupaten Cianjur	6,1	2,8	48,0	32,2	11,1	20,3	1,3	12,6	33,4	32,1
4	Kabupaten Bandung	12,7	4,7	36,1	37,3	8,8	19,3	35,6	17,8	6,8	20,9
5	Kabupaten Garut	10,6	2,4	13,9	37,2	4,0	19,5	31,4	14,2	40,2	26,7
6	Kabupaten Tasikmalaya	8,6	2,5	62,2	35,8	5,7	19,3	2,4	12,9	21,2	29,4
7	Kabupaten Ciamis	8,2	2,5	80,6	34,8	5,2	21,0	0,1	14,5	5,9	27,3
8	Kabupaten Kuningan	22,5	3,3	45,4	34,8	13,0	17,9	9,5	22,6	9,6	21,4
9	Kabupaten Cirebon	39,3	4,4	29,7	30,5	10,6	19,7	0,4	18,1	20,0	27,3
10	Kab Majalengka	19,0	5,0	65,5	33,6	5,5	17,5	1,7	15,0	8,3	28,9
11	Kabupaten Sumedang	13,9	3,8	57,8	34,3	3,7	19,0	16,1	14,8	8,6	28,1
12	Kab Indramayu	7,4	2,5	25,6	24,1	5,7	18,3	0,0	10,3	61,4	44,7
13	Kabupaten Subang	10,3	2,4	67,1	29,4	4,3	15,4	1,0	16,1	17,4	36,6
14	Kabupaten Purwakarta	4,8	4,5	25,8	30,6	3,5	15,1	0,0	21,3	65,9	28,5
15	Kabupaten Karawang	7,2	3,7	69,5	30,7	10,5	15,4	0,0	14,0	12,8	36,2
16	Kabupaten Bekasi	15,1	3,5	44,5	28,2	12,5	13,4	0,2	27,3	27,7	27,7
17	Kab Bandung Barat	9,3	1,5	40,1	34,5	3,5	21,1	32,0	14,3	15,1	28,6
18	Kota Bogor	55,0	22,1	19,0	32,7	1,3	15,8	6,6	10,1	18,1	19,3
19	Kota Sukabumi	21,5	13,9	42,9	33,6	27,3	16,0	2,0	14,8	6,4	21,6
20	Kota Bandung	86,7	35,6	4,8	31,2	1,1	11,9	2,1	7,8	5,3	13,5
21	Kota Cirebon	63,2	16,5	29,1	36,7	2,2	15,1	0,2	12,0	5,3	19,7
22	Kota Bekasi	40,2	41,6	50,7	25,4	5,8	8,6	0,1	7,3	3,2	17,1
23	Kota Depok	47,2	39,3	27,4	27,2	17,3	9,1	3,4	10,4	4,7	14,1
24	Kota Cimahi	59,4	6,8	12,8	37,1	3,3	15,7	21,4	22,1	3,1	18,3
25	Kota Tasikmalaya	26,9	17,0	44,5	32,9	6,4	15,0	0,4	14,9	21,7	20,2
26	Kota Banjar	35,9	4,5	41,2	39,4	7,0	17,3	0,0	17,9	15,8	20,8

akan perikanan tangkap. Wilayah tersebut meliputi kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis dan kota Banjar. Kabupaten Sukabumi, kabupaten Cianjur, kota Sukabumi yang termasuk dalam WP5 (Sukabumi dan sekitarnya) mempunyai potensi perikanan tangkap, bisnis kelautan dan peternakan. Kabupaten Bandung Barat termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung meskipun diarahkan untuk sektor pertanian hortikultura dan perkebunan, bukan peternakan dan perikanan.

Tabel 4 menunjukkan rangkuman pola

konsumsi serta produksi ikan dan pangan hewani lainnya. Pola konsumsi pangan penduduk tidak selalu sesuai dengan pola produksi pangan wilayah. Potensi ikan dan pangan hewani lainnya belum dimanfaatkan secara optimal menjadi pola makan karena berbagai faktor, antara lain harga, pendapatan, selera.

Pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk juga dibangun dari pasokan dari wilayah lain. Susunan jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencerminkan jenis pangan yang tersedia di suatu wilayah

Tabel 4 Pola produksi dan pola konsumsi ikan dan pangan hewani lainnya pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Pola Produksi	Pola Konsumsi
1	Kabupaten Bogor	DU, DR, I, T	DU, I, S, T
2	Kabupaten Sukabumi	DU, T, DR	I, DU, T, S
3	Kabupaten Cianjur	DU, I, T, DR	DU, I, T, S
4	Kabupaten Bandung	DU, S, DR, T, I	DU, I, T, S
5	Kabupaten Garut	I, S, DU, DR	DU, I, T, S
6	Kab Tasikmalaya	DU, I, DR, T	DU, I, T, S
7	Kabupaten Ciamis	DU, DR, I, T	DU, I, T, S
8	Kabupaten Kuningan	DU, DR, T, I, S	DU, I, S, T
9	Kabupaten Cirebon	DR, DU, I, T	DU, I, T, S
10	Kab Majalengka	DU, DR, I, T	DU, I, T, S, DR
11	Kabupaten Sumedang	DU, S, DR, I	DU, I, T, S
12	Kab Indramayu	I, DU, T, DR	I, DU, T, S
13	Kabupaten Subang	DU, I, DR	I, DU, S, T
14	Kabupaten Purwakarta	I, DU	DU, I, S, T
15	Kabupaten Karawang	DU, I, T, DR	I, DU, T, S
16	Kabupaten Bekasi	DU, I, DR, T	DU, I, S, T
17	Kab Bandung Barat	DU, S, I, DR	DU, I, T, S
18	Kota Bogor	DR, DU, I, S	DU, DR, I, T, S
19	Kota Sukabumi	DU, T, DR, I	DU, I, T, S, DR
20	Kota Bandung	DR, I	DR, DU, I, T, S
21	Kota Cirebon	DR, DU, I	DU, I, DR, T, S
22	Kota Bekasi	DU, DR, T	DR, DU, I, T, S
23	Kota Depok	DR, DU, T	DU, DR, I, S, T
24	Kota Cimahi	DR, S, DU	DU, S, I, T, DR
25	Kota Tasikmalaya	DU, DR, I, T	DU, I, DR, T, S
26	Kota Banjar	DU, DR, I, T	DU, I, S, T

Keterangan:

DR = Daging ruminansia; DU = Daging unggas; T= Telur; S = Susu; I = Ikan



(Gibson 2005), baik yang berasal dari produksi dan cadangan wilayah maupun dari perdagangan pangan antar wilayah (Baliwati 2012).

### Rasio Kecukupan Ikan dan Pangan Hewani Lainnya

Tingkat kemandirian ikan dan pangan hewani lainnya 26 kabupaten/kota sangat bervariasi seperti terdapat pada Tabel 5. Sebesar 13 kabupaten/kota (50%) telah mandiri ikan dan pangan hewani lainnya, dengan kisaran 90% (tingkat kemandirian rendah, di Kabupaten Majalengka) sampai dengan 395% (tingkat kemandirian tinggi,

di Kabupaten Ciamis). Separoh kabupaten/kota lainnya tidak mandiri ikan dan pangan hewani lainnya. Pemenuhan kebutuhan ikan dan pangan hewani lainnya sangat tergantung pada pasokan/impor dari wilayah lain.

Meskipun Kabupaten Majalengka mandiri pangan tetapi untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan normatif perlu didukung pasokan dari luar, utamanya dari Kabupaten/Kota se (WP) seperti dari Kabupaten Kuningan atau Indramayu atau dari WP lainnya di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, untuk Kabupaten Ciamis mengalami tingkat kemandirian hampir 3 (tiga) kali lipat maka Gubernur

Tabel 5 Tingkat kemandirian ikan dan pangan hewani lainnya di 26 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian (%)	Keterangan
1	Kabupaten Bogor	158	MPS
2	Kabupaten Sukabumi	156	MPS
3	Kabupaten Cianjur	165	MPS
4	Kabupaten Bandung	61	TMP
5	Kabupaten Garut	64	TMP
6	Kab Tasikmalaya	155	MPS
7	Kabupaten Ciamis	395	MPT
8	Kabupaten Kuningan	128	MPS
9	Kabupaten Cirebon	58	TMP
10	Kab Majalengka	90	MPR
11	Kabupaten Sumedang	78	TMP
12	Kab Indramayu	215	MPS
13	Kabupaten Subang	185	MPS
14	Kabupaten Purwakarta	257	MPT
15	Kabupaten Karawang	186	MPS
16	Kabupaten Bekasi	52	TMP
17	Kab Bandung Barat	189	MPS
18	Kota Bogor	30	TMP
19	Kota Sukabumi	108	TMP
20	Kota Bandung	26	TMP
21	Kota Cirebon	23	TMP
22	Kota Bekasi	21	TMP
23	Kota Depok	28	TMP
24	Kota Cimahi	16	TMP
25	Kota Tasikmalaya	83	TMP
26	Kota Banjar	100	MPS

sebagai koordinator 26 Kabupaten/kota dapat mengarahkan alur distribusi ke kabupaten/kota yang tergolong tidak mandiri pangan, melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

## KESIMPULAN

Terdapat 21 (80,8%) kabupaten/kota mempunyai konsumsi aktual di bawah konsumsi normatif. Konsumsi pangan ikan dan pangan hewani lainnya penduduk di Jawa Barat pada tahun 2012 tergolong rendah.

Kontribusi ikan dalam konsumsi pangan hewani sekitar 13-44 % sehingga menjadi salah satu komoditas penentu pola konsumsi pangan hewani di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Komoditas ikan juga menjadi pola produksi pangan hewani di hampir semua kabupaten/kota di Jabar, kecuali Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Cimahi. Pola konsumsi pangan penduduk belum memanfaatkan potensi sehingga tidak selalu sesuai dengan pola produksi pangan wilayah.

Tahun 2012 terdapat 13 (50 %) kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah mandiri pangan ikan dan pangan hewani lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Balitbang Pertanian RI] Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan 2005-2015. Jakarta: BPS.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2012. Panduan Penyusunan Neraca Bahan Makanan. Jakarta: BKP.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010-Data Agregat per Provinsi. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Jawa Barat Dalam Angka 2012. Bandung: BPS Jawa Barat.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Daerah Kota Bekasi. Bandung: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Jawa Barat Dalam Angka 2013. Bandung: BPS Jawa Barat.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2013. Profil

- Kehutanan 33 Provinsi. Jakarta: BPS.
- [FFTC] Food and Fertilizer Technology Centre. 2013. Japan's Food Self Sufficiency Ratio [Internet] [2014 Mei 28] <http://ap.ffc.agnet.org>.
- [IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2010. Food security and food self-sufficiency in Bhutan. Swiss.
- [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2004. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- [Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 tahun 2012] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 tahun 2012 tentang kemandirian Pangan: Jawa Barat.
- [Permentan No. 65 tahun 2010] Peraturan Menteri Pertanian No. 65 tahun 2010 Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota: Jakarta.
- Abrar H, Khomsan A, Heryanto Y. 2008. Analisis kemandirian pangan asal ternak dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Gizi dan Pangan* 3(3): 205-211.
- Baliwati YF. 2012. Diktat Analisis Ketersediaan Pangan Berbasis NBM. Bogor (ID): Departemen Gizi Masyarakat IPB.
- Billah M T. 2013. Buletin Konsumsi Pangan. *Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian* 4(2).
- Cahyaningsih R. 2008. Analisis Pola Konsumsi Pangan Di Jawa Barat [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Farhan M. 2008. Kecukupan konsumsi pangan hewani di Kota Jambi dalam hubungannya kualitas sumberdaya manusia keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan* 9(2).
- Gibson RS. 2005. Principles Of Nutritional Assessment Sec edition. Inggris: Oxford Univ Press.
- Hardinsyah, Baliwati YF, Martianto D, Handewi S, Rachman, Widodo A, Subiyakto. 2001. Pengembangan Konsumsi dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan. Bogor (ID): Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi.

- Luan Y, Cui X, Ferrat M. 2013. Historical trends of food self-sufficiency in Africa. *Food Security* 5:393-405.
- Muir J F. 2013. Fish, feeds, and food security. *Animal Frontiers* 3(1): 10.
- Munger R G, Cerhan J R, Chiu B C-H. 1999. Prospective study of dietary protein intake and risk of hip fracture in postmenopausal women. *Am. Journsl Clin Nutrition* 69(1):47-52.
- Simatupang, P. 2001. Food Security, Basic Concepts and Measurement ini Food Securitu in Southwest Pacific Island Countries. CGPRT Center Works Toward Enhanching Sustainable Agriculture and Reducing Poverty in Asia and The Pacific.
- Wahyuni K. 2011. Analisis faktor penentu dalam mengkonsumsi ikan pada rumah tangga di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur [skripsi]. Malang: Universitas Brawijaya.